



SIARAN PERS

Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2019.

Manado, 12 Desember 2019

Bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis 12 Desember 2019 dilakukan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2019. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CfrA., CSFA. kepada Lima Kepala Daerah dan Ketua DPRD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Enam Laporan Hasil Pemeriksaan Yang diserahkan adalah:

1. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Manado.
2. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. LHP Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Minahasa
4. LHP Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bitung.
5. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
6. LHP DTT atas Kepatuhan atas Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Manado TA 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2019.

Terhadap Lima LHP Kinerja yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, BPK memberikan Kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan, Pengelolaan Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia adalah **Kurang Efektif**.

Sementara untuk Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Asli, BPK memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Manado **Belum merancang Sistem Pengendalian Intern** terkait Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara memadai, dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara